

## Faktor pembentuk budaya politik masyarakat pesisir di wilayah Permukiman Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar

Irwan Putra\*, Maimun, Izza Madani

Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, Indonesia

\*korespondensi penulis irwanputra@usk.ac.id

### Informasi Artikel

**Received:**

11/10/2024

**Accepted:**

30/10/2024

### ABSTRAK

Isolasi geografis, pendidikan, status sosial dan ekonomi, serta keterasingan dari lingkungan non-nelayan dianggap mempengaruhi partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji budaya politik masyarakat pesisir di wilayah Permukiman Lamnga. Studi ini termasuk tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut. Data dikumpulkan wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, jenis pekerjaan, usia, kondisi ekonomi, dan agama secara signifikan mempengaruhi pola partisipasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi dari faktor-faktor tersebut membentuk budaya politik masyarakat pesisir di Permukiman Lamnga, yang berarti bahwa partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu tetapi juga oleh konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

**Kata kunci :** budaya politik, faktor pembentuk, masyarakat pesisir

### ABSTRACT

*Geographic isolation, education, socio-economic status, and alienation from non-fishermen environments are considered to influence political participation. This study aims to examine the political culture of coastal communities in the Lamnga Settlement area. The study adopts a descriptive type with a qualitative approach to gain a deeper understanding of the phenomenon. Data were collected through interviews with informants selected based on purposive sampling techniques. Data analysis techniques were conducted through three stages: data reduction, data display, and verification. The research findings indicate that factors such as education level, surrounding environment, type of occupation, age, economic conditions, and religion significantly influence patterns of political participation. The study concludes that the combination of these factors shapes the political culture of coastal communities in the Lamnga Settlement, suggesting that political participation is influenced not only by individual factors but also by broader social and cultural contexts.*

**Keywords:** coastal communities, formative factors, political culture

*Copyright © 2024 (Irwan Putra, Maimun, Izza Madani). All Right Reserved*

**How to Cite:** Putra, I., Maimun, M. dan Madani, I. (2024). Faktor pembentuk budaya politik masyarakat pesisir di wilayah Permukiman Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(1), 429-437. DOI. 10.21009/jimd.v24i1.49746



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman ras, suku, agama, adat istiadat, maupun budaya (Rochmansjah & Saputra, 2024). Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dari bineka tunggal ika, yakni lambang/semboyan yang menyatakan “walaupun berbeda tetap bersatu” dan ini menggambarkan kondisi Indonesia yang saling menghargai perbedaan. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari luasnya negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, yakni dari Sabang sampai Merauke yang memiliki keragaman budaya dengan ciri khasnya masing-masing (Pangalila et al., 2024). Dalam hal ini, termasuk juga perbedaan budaya politik yang ikut berkembang sesuai dengan adat/istiadat, agama, kesukuan, status sosial, konsep kekuasaan, dan kepemimpinan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (Blaydes & Grimmer, 2019). Saat ini, budaya Politik Indonesia merupakan bagian kombinasi dari Parokial, Kaula, dan Partisipan serta merujuk pada orientasi dan tingkah laku individu terhadap sistem politik. Sistem politik ini memiliki tiga aspek yang mencakup orientasi kognitif, orientasi afektif, serta orientasi evaluatif (Zmigrod & Tsakiris, 2021).

Idealnya, budaya politik harus diarahkan pada pembangunan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Nugraha, 2023). Pembangunan politik juga ditujukan kepada pengembangan etika dan moral budaya dalam mewujudkan kehidupan yang mantap dengan semakin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik secara efektif, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab (Jarrar, 2019; Haiting, 2021). Pembangunan kebudayaan merupakan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa karena budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika pada praktiknya menanggalkan martabat dan integritas manusia (Heffernan, 2019; Plys, 2022). Selain itu, kebudayaan mengandung pola perilaku sosial masyarakat dan politik merupakan salah satu bagian dalam dinamika kebudayaan. Sehingga pengembangan budaya diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan politik menjadi lebih baik (Rayman-Bacchus & Radavoi, 2019).

Faktor lain yang turut memberikan pengaruh dalam budaya politik masyarakat adalah kondisi geografis. Sebagaimana hasil studi pendahuluan oleh Gimpel dan Reeves (2024) bahwa budaya politik memiliki perbedaan antara masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun pesisir. Umumnya, masyarakat di perkotaan lebih aktif dalam dunia politik karena akses informasi yang mudah didapatkan (Boudreau et al., 2022). Sementara di pedesaan, disela-sela kesibukannya masih dapat memperoleh informasi melalui televisi dan sejenisnya bahkan dapat menyesuaikan waktu dalam keterlibatannya dengan politik (Liu et al., 2023). Namun di wilayah pesisir, masyarakat cenderung acuh tak acuh berpartisipasi dalam politik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki, yakni masyarakat yang sering disibukkan dengan pekerjaannya sendiri. Sebagai contoh, di wilayah pesisir yang didominasi oleh para nelayan, biasanya lebih sering menghabiskan waktu di lautan yakni memancing ikan, berangkat sore dan pulang menjelang subuh serta waktu libur hanya pada malam Jumat saja. Sehingga sangat minim waktu yang dimiliki untuk keterlibatannya dengan dunia politik.

Fenomena yang telah diuraikan menjadi bukti adanya kesenjangan perilaku politik, antara masyarakat kota dan masyarakat desa maupun pesisir. Kesenjangan tersebut melahirkan dikotomi antara pusat dan pinggiran yang ditandai dengan masyarakat kota cenderung tumbuh menjadi lebih kritis, sensitif, dan peka dalam memahami masalah-masalah politik dan kehidupan lainnya. Supra dan Infrastruktur politik yang memadai juga memudahkan masyarakat kota untuk melakukan interaksi dengan dinamika politik yang terjadi. Sementara masyarakat pesisir cenderung memegang image sebagai masyarakat yang tertinggal dan asing dengan permasalahan-permasalahan dinamika politik (Ounanian & Howells, 2024). Perbedaan budaya politik antara masyarakat kota dengan pesisir juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan, pekerjaan,

usia, agama, lingkungan pergaulan, taraf ekonomi serta media massa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan kata lain, sejumlah faktor telah disebutkan menyebabkan kesadaran politik warga menjadi faktor determinan dalam partisipasinya dengan dunia politik (Duval & Pétry, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis berkeinginan untuk melakukan pengkajian secara mendalam dengan judul yaitu “Faktor Pembentuk Budaya Politik Masyarakat Wilayah Pesisir di Permukiman Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar”.

## Metode

Penelitian ini tergolong tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan menggambarkan faktor pembentuk budaya politik masyarakat pesisir di Permukiman Lamnga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling sebagaimana terlihat pada table 1. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Emzir, 2014) yakni reduksi data, display data dan verifikasi.

**Tabel 1.** Subjek Penelitian

NO	INFORMAN	Jumlah
1.	Durung	3 Orang
2.	Gampong Baro	3 Orang
3.	Ladong	3 Orang
4.	Lamnga	3 Orang
5.	Neuhen	3 Orang

## Hasil dan Pembahasan

Budaya politik masyarakat pesisir di Permukiman Lamnga, yang terdiri dari lima desa yaitu Lamnga, Neuhen, Durung, Gampong Baro, dan Ladong, dibentuk oleh berbagai faktor yang saling terkait. Secara keseluruhan, budaya politik di Permukiman Lamnga dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang beragam, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, jenis pekerjaan, usia, dan agama, yang semuanya berkontribusi dalam membentuk dinamika politik yang khas di masing-masing desa. Pada Desa Lamnga, Budaya politik terbentuk oleh berbagai faktor yang mencerminkan karakteristik masyarakat pesisir. Berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber, yaitu MJ, KM, dan RI, terlihat bahwa tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, jenis pekerjaan, usia, kondisi ekonomi, dan agama memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik di desa ini.

Tingkat pendidikan di Desa Lamnga bervariasi, dan hal ini memengaruhi partisipasi serta pemahaman politik masyarakat. Menurut KM, masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik. Individu sering terlibat dalam forum politik, kegiatan desa, dan kampanye politik. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang memahami isu-isu politik meskipun tetap berpartisipasi aktif. Lingkungan sekitar juga berperan penting dalam membentuk budaya politik. Desa Lamnga yang terletak di pesisir memiliki karakteristik sosial yang kuat, di mana solidaritas dan keterbukaan menjadi nilai utama. MJ menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat politik, masyarakat desa cenderung menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Lingkungan yang mendukung dialog dan keterbukaan ini membantu masyarakat mencari kesepahaman di tengah perbedaan.

Jenis pekerjaan juga memengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Lamnga. Banyak warga desa bekerja sebagai nelayan atau di sektor perikanan, yang sering kali menyita waktu dan tenaga. RI menyebutkan bahwa pekerjaan yang menuntut ini bisa menjadi alasan mengapa beberapa warga kurang aktif atau acuh tak acuh terhadap kegiatan politik. Pengaruh pekerjaan terhadap partisipasi politik ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan ketersediaan waktu sangat berpengaruh dalam keterlibatan politik. Usia merupakan faktor lain yang memengaruhi budaya politik di Desa Lamnga. RI mengungkapkan bahwa warga yang lebih tua mungkin merasa kurang relevan dalam urusan politik, sementara generasi muda lebih aktif dalam berpartisipasi. Perbedaan pandangan dan partisipasi politik antar generasi ini menunjukkan

bahwa pengalaman dan prioritas hidup yang berbeda memengaruhi cara pandang dan keterlibatan dalam politik.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lamnga juga memainkan peran signifikan dalam membentuk budaya politik. Warga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses lebih besar terhadap informasi politik dan lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, mereka yang kondisi ekonominya kurang baik mungkin merasa terpinggirkan dan kurang terlibat dalam proses politik. Agama juga menjadi landasan kuat dalam pembentukan budaya politik di Desa Lamnga. Nilai-nilai ajaran Islam sangat dihargai dan menjadi pedoman dalam kehidupan politik masyarakat. MJ menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai keagamaan dan mencari kesepahaman di antara perbedaan politik. Agama berperan sebagai perekat sosial yang membantu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman pandangan politik.

Secara keseluruhan, budaya politik di Desa Lamnga mencerminkan kompleksitas masyarakat pesisir. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, jenis pekerjaan, usia, kondisi ekonomi, dan agama semuanya berkontribusi dalam membentuk dinamika politik di desa ini. Upaya kolaboratif antara tokoh politik, masyarakat, dan calon pemimpin sangat diperlukan untuk membangun kesepahaman dan memenuhi harapan-harapan politik masyarakat Desa Lamnga. Pada Desa Neuhen, Budaya politik terbentuk oleh berbagai faktor yang mencerminkan realitas sosial-politik masyarakat pesisir. Informasi dari tiga narasumber, yaitu YS, AG, dan SF, memberikan gambaran tentang keunikan dan pola yang membentuk budaya politik di desa ini.

Tingkat pendidikan di Desa Neuheun mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan politik masyarakat. YS mengamati bahwa terdapat minat signifikan terhadap dunia politik, terutama di kalangan aparat desa. Tingkat pendidikan yang memadai memungkinkan individu untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, baik sebagai tim sukses dalam kampanye maupun menjabat sebagai kepala desa. Namun, variasi dalam tingkat pendidikan juga menciptakan perbedaan dalam cara dan intensitas keterlibatan politik, di mana sebagian warga terlibat langsung dalam perangkat desa, sementara yang lain berpartisipasi pada level yang lebih rendah atau tidak langsung. Lingkungan sekitar Desa Neuheun, yang luas dan beragam, juga berperan penting dalam pembentukan budaya politik. AG menyatakan bahwa masyarakat desa mampu terbuka dan menyesuaikan diri dengan budaya luar yang dibawa oleh non-pribumi. Keberagaman lingkungan ini mendorong masyarakat untuk bersikap lebih inklusif dan menerima perbedaan, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika politik desa. Toleransi terhadap budaya luar mencerminkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial-politik.

Jenis pekerjaan masyarakat Desa Neuheun turut mempengaruhi partisipasi politik. Banyak warga bekerja dalam sektor yang menuntut waktu dan tenaga, seperti pertanian atau perikanan, yang dapat membatasi keterlibatannya dalam kegiatan politik. Meskipun demikian, warga yang memiliki pekerjaan yang lebih fleksibel cenderung lebih aktif dalam politik, seperti terlibat dalam kampanye atau pertemuan desa. Peran pekerjaan dalam partisipasi politik ini menunjukkan adanya hubungan antara ekonomi dan keterlibatan politik. Usia juga menjadi faktor penting dalam budaya politik Desa Neuheun. Warga yang lebih tua mungkin merasa kurang relevan dengan proses politik, sementara generasi muda menunjukkan minat dan keterlibatan yang lebih besar. Perbedaan generasi ini mencerminkan perubahan dalam cara pandang dan prioritas politik, di mana generasi muda lebih terdorong untuk terlibat dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi memainkan peran signifikan dalam budaya politik Desa Neuheun. YS menyoroti bahwa kebutuhan akan kesejahteraan dan pembangunan desa menjadi pendorong utama partisipasi politik. Tokoh politik yang dihargai adalah mereka yang mampu membangun infrastruktur dan memberikan bantuan sosial. Solidaritas sosial yang kuat di antara warga desa menciptakan dorongan kolektif untuk mendukung upaya pembangunan dan kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya memperkuat keterlibatan politik. Agama Islam merupakan landasan utama dalam kehidupan masyarakat Desa Neuheun. SF menjelaskan bahwa budaya politik di desa ini sering kali berakar pada nilai-nilai agama, dengan aktivitas keagamaan seperti pengajian dan pendidikan agama memainkan peran penting. Tokoh politik yang terlibat erat dalam kegiatan keagamaan dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, menunjukkan bahwa komitmen kepada agama menjadi kriteria penting dalam pemilihan pemimpin politik.

Secara keseluruhan, budaya politik di Desa Neuheun mencerminkan campuran nilai-nilai agama, solidaritas sosial, dan kebutuhan akan pembangunan desa. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan

partisipasi politik yang lebih merata dan kepercayaan terhadap proses politik. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya partisipasi dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat budaya politik yang positif di Desa Neuheun. Pada Desa Ladong, Budaya politik terbentuk oleh berbagai faktor yang mencerminkan dinamika sosial dan politik masyarakat pesisir. Berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber, yaitu FM, MS, dan OI, dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang membentuk budaya politik di desa ini, termasuk tingkat pendidikan, lingkungan sosial, jenis pekerjaan, usia, kondisi ekonomi, dan agama.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ladong beragam dan mempengaruhi partisipasi serta pemahaman politik. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik. Namun, kesenjangan pendidikan menyebabkan sebagian warga kurang memahami pentingnya keterlibatan dalam proses politik, sehingga mereka cenderung kurang aktif atau acuh tak acuh terhadap politik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan politik agar semua lapisan masyarakat bisa terlibat lebih aktif. Lingkungan sosial di Desa Ladong mempengaruhi budaya politik secara signifikan. Menurut MS, perbedaan sudut pandang politik di desa ini disebabkan oleh karakteristik unik dari masing-masing individu. Lingkungan sosial yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan pandangan politik memungkinkan masyarakat untuk berdialog dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dialog bisa menghambat partisipasi politik yang merata. Penting bagi desa untuk memfasilitasi lingkungan sosial yang mendukung keterlibatan semua warga dalam politik.

Mayoritas penduduk Desa Ladong adalah nelayan, pekerjaan yang keras dan menuntut banyak waktu serta tenaga. FM mencatat bahwa pekerjaan sebagai nelayan membentuk karakter yang kuat dan prinsip yang kokoh di kalangan masyarakat. Pekerjaan ini tidak hanya mempengaruhi pandangan politik mereka tetapi juga ketersediaan waktu untuk terlibat dalam kegiatan politik. Warga yang sibuk dengan pekerjaan mungkin kurang terlibat dalam politik, sehingga ada kebutuhan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan politik agar lebih inklusif bagi semua warga. Usia menjadi faktor penting dalam partisipasi politik di Desa Ladong. Meskipun kesadaran politik cukup tinggi, OI mencatat bahwa pemuda cenderung kurang tertarik atau tidak aktif dalam politik. Faktor-faktor seperti etos kerja dan minat yang berbeda mempengaruhi partisipasi mereka. Untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda, diperlukan program yang menarik minat mereka dan menjelaskan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan desa.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Ladong juga mempengaruhi partisipasi politik. Warga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik mungkin memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sedangkan mereka yang kondisi ekonominya kurang baik mungkin merasa terbebani dengan masalah keseharian sehingga kurang terlibat dalam politik. Perbedaan kondisi ekonomi ini menciptakan kesenjangan dalam partisipasi politik yang perlu diatasi melalui program pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan mendukung. Agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Ladong. Menurut MS, pandangan politik masyarakat juga dipengaruhi oleh tokoh ulama setempat. Nilai-nilai agama memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat dalam membentuk pandangan politik mereka. Tokoh agama sering kali menjadi panutan dalam hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika politik, sehingga keterlibatan mereka dalam proses politik bisa memperkuat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Secara keseluruhan, budaya politik di Desa Ladong mencerminkan keragaman sikap dan tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Meskipun sebagian besar masyarakat aktif dalam kegiatan politik, masih ada tantangan dalam memastikan kontribusi politik yang efektif terhadap pembangunan desa. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang inklusif untuk meningkatkan kesadaran politik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan merangkul generasi muda agar lebih terlibat dalam proses politik dan pembangunan desa. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik, program pemberdayaan ekonomi, dan penguatan peran tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam membimbing partisipasi politik yang positif. Pada Gampong Baro, Budaya politik terbentuk dari berbagai faktor yang saling terkait, mencerminkan kompleksitas masyarakat pesisir yang memiliki karakteristik unik. Berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber yaitu SY, TM, dan FS, faktor-faktor pembentuk budaya politik di Gampong Baro dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik. SY mencatat bahwa masyarakat Gampong Baro cenderung keras dan berprinsip, yang sebagian besar dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan mereka. Pendidikan yang baik biasanya menghasilkan individu yang lebih kritis dan aktif dalam politik, sedangkan mereka yang kurang berpendidikan mungkin lebih pasif atau terpengaruh oleh tokoh tertentu. Lingkungan sosial dan pergaulan sehari-hari sangat mempengaruhi budaya politik masyarakat Gampong Baro. Menurut SY, sejarah desa yang dipengaruhi oleh pertarungan politik lokal dan basis politik dari partai lokal serta aktivis GAM membentuk fondasi dari karakteristik politik masyarakat. Lingkungan yang memiliki sejarah politik yang kuat cenderung menghasilkan masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam kegiatan politik.

Mayoritas penduduk Gampong Baro adalah nelayan, yang pekerjaannya relatif keras dan mempengaruhi pandangan politik mereka. SY menjelaskan bahwa karakter keras dan berprinsip masyarakat tercermin dalam sikap politik mereka. Nelayan yang memiliki jadwal kerja yang padat mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam politik pada tingkat yang lebih praktis dan langsung. Usia juga mempengaruhi partisipasi politik. TM menyatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan sudut pandang politik, masyarakat cenderung menghargai perbedaan tersebut dan menerima hasil pemilihan dengan tenang. Ini menunjukkan adanya kedewasaan politik, yang biasanya ditemukan pada generasi yang lebih tua. Di sisi lain, generasi muda mungkin kurang tertarik atau aktif dalam politik karena berbagai alasan, termasuk kekecewaan terhadap kondisi politik sebelumnya.

Kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi partisipasi politik. FS menyebutkan bahwa ada sebagian masyarakat yang pasif dalam politik karena sibuk dengan pekerjaan atau kecewa dengan kondisi politik. Mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang baik mungkin lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sementara mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mungkin kurang terlibat. Agama memainkan peran signifikan dalam budaya politik di Gampong Baro. TM menjelaskan bahwa tokoh agama yang religius dan aktif membantu desa sangat dihargai oleh masyarakat dan memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran politik. Aktivitas keagamaan sering menjadi platform untuk diskusi politik dan pembentukan opini. Namun, keputusan politik masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan oleh tokoh agama, karena masyarakat juga mempertimbangkan kontribusi nyata dari calon pemimpin.

Secara keseluruhan, budaya politik di Gampong Baro mencerminkan interaksi antara berbagai faktor ini. Meskipun ada perbedaan pendapat politik, masyarakat menunjukkan kedewasaan dalam menerima perbedaan dan partisipasi aktif dalam proses politik. Kepercayaan terhadap pemimpin politik dan kontribusi nyata dari calon pemimpin sangat mempengaruhi partisipasi politik. Untuk mempertahankan budaya politik yang baik, penting bagi masyarakat Gampong Baro untuk terus memperhatikan kontribusi para calon pemimpin, menjaga sikap kritis terhadap politik, dan menghormati perbedaan pendapat. Upaya peningkatan pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi juga dapat memperkuat partisipasi politik yang positif di desa ini. Pada Desa Durung, Budaya politik terbentuk dari berbagai faktor yang saling terkait, mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kaya dan kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber utama yaitu AL, AN, dan AZ, beberapa faktor pembentuk budaya politik di Desa Durung yaitu, tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, jenis pekerjaan, usia, kondisi ekonomi, dan agama.

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Meskipun tingkat pendidikan di Desa Durung bervariasi, pendidikan yang lebih tinggi umumnya menghasilkan individu yang lebih kritis dan aktif dalam politik. AL menggarisbawahi bahwa tokoh-tokoh desa yang terlibat dalam politik, seperti kepala desa dan tuha peut, biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, yang memungkinkan mereka untuk memahami dan terlibat lebih dalam dalam urusan politik. Lingkungan sosial dan geografis Desa Durung berperan dalam membentuk budaya politik. AN mencatat bahwa meskipun terdapat perbedaan sudut pandang politik, masyarakat cenderung menyikapinya dengan damai dan rukun. Lingkungan desa yang harmonis ini menekankan pentingnya toleransi dan kearifan lokal dalam bermasyarakat, yang tercermin dalam cara masyarakat berpolitik.

Mayoritas penduduk Desa Durung bekerja di sektor pertanian dan perikanan, pekerjaan yang keras dan menuntut. AZ menyatakan bahwa kerasnya karakteristik masyarakat dapat dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan politik. Pekerjaan yang menuntut fisik mungkin mempengaruhi pandangan politik mereka yang cenderung realistis dan pragmatis. Variasi usia di antara masyarakat juga mempengaruhi budaya politik. Generasi yang lebih tua, seperti yang diwakili oleh AL dan AN, cenderung lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Mereka yang lebih muda mungkin kurang terlibat, tetapi tetap menunjukkan kepedulian terhadap kondisi politik desa melalui berbagai bentuk partisipasi.

Kondisi ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi partisipasi politik. Ketiga narasumber sepakat bahwa sebagian masyarakat yang sudah puas dengan kondisi ekonominya mungkin kurang terlibat dalam politik. Namun, mayoritas masyarakat Desa Durung yang masih memperjuangkan kesejahteraan ekonomi cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik, karena mereka melihat politik sebagai cara untuk mencapai perbaikan kondisi hidup. Agama memegang peran sentral dalam kehidupan dan budaya politik di Desa Durung. AZ menyoroti bahwa tokoh politik yang dihormati adalah mereka yang jujur, amanah, dan dekat dengan agama. Nilai-nilai keagamaan mempengaruhi preferensi politik masyarakat, dan tokoh agama sering kali menjadi panutan dalam pengambilan keputusan politik.

Secara keseluruhan, budaya politik di Desa Durung mencerminkan kompleksitas dan dinamika masyarakat lokal. Kesadaran politik yang tinggi, peran penting tokoh politik dan agama, serta toleransi dan harmoni sosial menjadi ciri khas budaya politik di desa ini. Partisipasi politik yang aktif dan kepercayaan terhadap tokoh yang berkontribusi nyata dalam pembangunan desa menunjukkan adanya semangat partisipasi dalam membangun komunitas yang lebih baik. Meskipun ada tantangan dalam menjaga partisipasi politik yang merata, kearifan lokal dan semangat kebersamaan menjadi kunci dalam menjaga budaya politik yang positif di Desa Durung.

### **Pembahasan**

Pembentukan budaya politik masyarakat pesisir di Permukiman Lamnga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencerminkan kompleksitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Salah satu faktor penting adalah tingkat pendidikan. Menurut Stoddard (2022), tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari tamatan SMA hingga S1, memengaruhi pemahaman dan partisipasi politik masyarakat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam proses demokratisasi, sementara tingkat pendidikan yang rendah mungkin menghadirkan tantangan tersendiri dalam memahami isu-isu politik yang kompleks. Lingkungan tempat tinggal juga memiliki peranan besar terhadap pembentukan budaya politik masyarakat pesisir di Lamnga. Lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi dapat membentuk pola perilaku politik masyarakat. Misalnya, kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh laut dapat menciptakan kesadaran akan isu-isu lingkungan yang kemudian memengaruhi sikap politik warga terhadap kebijakan lingkungan. Menurut penelitian Paterson dan Ilan Chabay (2024), masyarakat pesisir cenderung memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, karena kehidupannya sangat tergantung pada kelestarian sumber daya alam.

Lebih lanjut, struktur yang didominasi oleh nelayan membuatnya cenderung memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu maritim dan perikanan, serta berpotensi menjadi basis politik yang kuat. Namun, keberagaman pekerjaan di masyarakat pesisir juga memunculkan dinamika politik yang kompleks, karena setiap kelompok pekerjaan seperti petani, peternak bahkan pengusaha memiliki kepentingan dan tantangan yang berbeda. Menurut Szewczyk dan Crowder-Meyer (2020) pemahaman dinamika ekonomi dan pengaruh politik terhadap kehidupannya memainkan peran penting dalam membentuk pola partisipasi politik masyarakat pesisir. Faktor lain yang berpengaruh adalah usia, yang cenderung didominasi oleh pemuda. Pemuda memiliki peran penting dalam membentuk budaya politik di Permukiman Lamnga karena kalangan tersebut adalah generasi yang akan membawa perubahan di masa depan. Keaktifan pemuda dalam kegiatan politik, baik melalui organisasi kepemudaan, partisipasi dalam pemilihan umum, atau advokasi untuk isu-isu penting, dapat membentuk arah politik suatu komunitas. Dalam konteks ini, Subagja (2023), menjelaskan bahwa pemuda memiliki potensi besar dalam menggerakkan perubahan politik di tingkat lokal maupun nasional.

Tak dapat dipungkiri bahwa agama, khususnya Islam, juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik masyarakat pesisir di Permukiman Lamnga. Sebagai wilayah yang merupakan percontohan syariat Islam di Aceh, nilai-nilai Islam dan pandangan terhadap politik yang berlandaskan agama sangat memengaruhi pola pikir dan tindakan politik masyarakat. Agama Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam partisipasi politik, praktek keagamaan di dalam masyarakat juga menciptakan dinamika politik yang khas dan kompleks dalam kehidupan masyarakat pesisir di Permukiman Lamnga. Dengan demikian, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, lingkungan, struktur pekerjaan, usia, ekonomi, dan agama Islam semuanya saling berinteraksi dalam membentuk budaya politik yang khas di Permukiman Lamnga. Memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor ini dapat membantu dalam

merancang kebijakan yang lebih efektif dan mendukung partisipasi politik yang lebih inklusif di masyarakat pesisir.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya politik masyarakat pesisir di Permukiman Lamnga terbentuk dari interaksi kompleks antara beberapa faktor yang mencerminkan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran politik.

Lingkungan tempat tinggal, terutama yang dipengaruhi oleh kehidupan laut, juga membentuk pola perilaku politik dengan menciptakan kesadaran akan isu lingkungan. Struktur pekerjaan yang didominasi oleh nelayan memberikan fokus pada isu maritim dan perikanan, sementara keberagaman pekerjaan menciptakan dinamika politik yang kompleks. Usia, terutama peran aktif pemuda, juga mempengaruhi pembentukan budaya politik dengan potensi besar untuk menggerakkan perubahan politik di tingkat lokal dan nasional.

Agama terutama Islam, juga memainkan peran signifikan dalam membentuk budaya politik dengan memberikan landasan moral dan etika yang kuat. Interaksi antara faktor-faktor ini membentuk budaya politik yang khas di Permukiman Lamnga, yang perlu dipahami secara komprehensif untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan mendukung partisipasi politik yang inklusif di masyarakat pesisir.

## Referensi

- Blaydes, L., & Grimmer, J. (2019). Political cultures: measuring values heterogeneity. *Political Science Research and Methods*, 8(3), 571–579. <https://doi.org/10.1017/psrm.2019.43>
- Boudreau, C., Elmendorf, C. S., & MacKenzie, S. A. (2022). The Civic Option? Using Experiments to Estimate the Effects of Consuming Information in Local Elections. *Journal of Experimental Political Science*, 10(3), 1–12. <https://doi.org/10.1017/xps.2022.19>
- Duval, D., & Pétry, F. (2023). Citizens' awareness of electoral campaign pledges. *Party Politics*, 30(6). <https://doi.org/10.1177/13540688231199976>
- Gimpel, J. G., & Reeves, A. (2024). The urban-rural divide and residential contentment as antecedents of political ideology. *Cities*, 146, 104720–104720. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104720>
- Haiting, F. (2021). Political Culture of Transforming Countries: The Experience of China in the Past 40 Years since Reform and Opening Up. *Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law*, 14(2), 48–65. <https://doi.org/10.23932/2542-0240-2021-14-2-3>
- Heffernan, A. (2019). Culture, Democracy and Development in Africa. *Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne Des Études Africaines*, 53(1), 190–191. <https://doi.org/10.1080/00083968.2019.1567014>
- Jarrar, A. G. (2019). Moral Values and Cultural Development in the Arab World: An Analytical Study on Religion and Language. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 85. <https://doi.org/10.7176/jlpg/85-21>
- Liu, Y., Zheng, L., & Qian, W. (2023). How Rural Residents Access News and Its Influence on Social Trust: Based on the Data of the China Family Panel Studies. *Sustainability*, 15(4), 3269. <https://doi.org/10.3390/su15043269>
- Nugraha, I. Y. (2023). Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(2). <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad002>
- Onanian, K., & Howells, M. (2024). Deconstructing and resisting coastal displacement: A research agenda. *Progress in Human Geography*, 48(5), 636–654. <https://doi.org/10.1177/03091325241240581>

- Pangalila, T., Rotty, V. N. J., & Rumbay, C. A. (2024). The diversity of interfaith and ethnic relationships of religious community in Indonesia. *Verbum et Ecclesia*, 45(1). <https://doi.org/10.4102/ve.v45i1.2806>
- Paterson, S. K., & Ilan Chabay. (2024). Navigating the currents of coastal narratives in search of sustainable futures. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 29(5). <https://doi.org/10.1007/s11027-024-10142-4>
- Plys, K. (2022). Political Work on a Cultural Front. *Historical Materialism*, 30(3), 206–235. <https://doi.org/10.1163/1569206x-20221954>
- Rayman-Bacchus, L., & Radavoi, C. N. (2019). Advancing culture's role in sustainable development: social change through cultural policy. *International Journal of Cultural Policy*, 26(5), 1–19. <https://doi.org/10.1080/10286632.2019.1624735>
- Rochmansjah, H., & Saputra, R. (2024). Decoding Public Policy: How Cultural Dynamics Shape Decision-Making in Indonesia's Political Landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(4), 77–96. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2232>
- Stoddard, S. V. (2022). The Civic Value of Education: How Scholastic Experiences Create Active Citizens. *American Politics Research*, 51(4), 1532673X2211440. <https://doi.org/10.1177/1532673x221144053>
- Szewczyk, J., & Crowder-Meyer, M. (2020). Community Income Inequality and the Economic Gap in Participation. *Political Behavior*, 44. <https://doi.org/10.1007/s11109-020-09621-6>
- Zmigrod, L., & Tsakiris, M. (2021). Computational and neurocognitive approaches to the political brain: key insights and future avenues for political neuroscience. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 376(1822), 20200130. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0130>